

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim (2020:101) mendefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut: “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Erlina dan Rasdianto (2019:111), menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: “Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.1.2. Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang

dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Menurut Mahmudi (2020: 74), pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Menurut Halim (2017:101) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang bersal dari pajak. Pajak daerah itu sendiri meliputi: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta BPHTB.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah meliputi:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan dan kesampahan/kebersihan
- b. Retribusi penggantian biaya cetak ktp dan beban cetak akta catatan sipil
- c. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- e. Retribusi pelayanan pasar
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- h. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus

- i. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - j. Retribusi jasa usaha terminal dan tempat potong hewan
 - k. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga
 - l. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:
- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro; Pendapatan bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah

Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Khodariah (2020) terdiri dari tiga bagian yaitu.

- 1. Jumlah Penduduk
- 2. Produk Domestik Regional Bruto

3. Pengeluaran Pemerintah

2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

2..1.2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Bastian (2019: 44), “Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”. Sedangkan menurut Halim (2020: D5), “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk memdanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

Indikator Dana Alokasi Umum (DAU) menurut LPEM (2013: 3) terdiri dari dua bagian yaitu.

1. Potensi penerimaan

a. Potensi industri

- b. Potensi Sumber Daya Alam
- c. Potensi Sumber Daya Manusi
- d. PDRB

2. Kebutuhan fiskal

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Indeks harga bangunan
- d. Jumlah orang miskin

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang menggunakan beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan.

2.1.2.2. Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Setyawati (2017: 213), ada beberapa alasan perlunya dilakukan pemberian Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke daerah, yaitu:

1. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan fiskal vertical. Hal ini disebabkan sebahagian besar sumber-sumber penerimaan utama di negara yang bersangkutan. Jadi pemerintah daerah hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut

pajak yang bersifat lokal dan mobilitas yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.

2. Untuk menanggulangi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Hal ini disebabkan karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah dan sangat bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.
3. Untuk menjaga standar pelayanan minimum di setiap daerah tersebut.
4. Untuk stabilitas ekonomi. Dana Alokasi Umum dapat dikurangi di saat perekonomian daerah sedang maju pesat, dan dapat ditingkatkan ketika perekonomian sedang lesu.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2017: 10), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Tambunan (2019: 46), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Sementara menurut Hasyim (2017: 231), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara

secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Ada tiga komponen dasar yang diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yaitu:

1. Meningkatnya secara terus menerus persediaan barang.
2. Teknologi maju sebagai faktor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya.
3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh IPTEK umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Lebih lanjut Hasyim (2017: 232) menjelaskan para ekonom sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan output barang atau material dan jasa dalam suatu jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

2.1.3.2. Perkembangan Teori – Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hasyim (2017: 233), teori pertumbuhan ekonomi mempelajari faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor-faktor tersebut beragam, sehingga banyak pula teori pertumbuhan ekonomi yang bermunculan. Menurut Sukirno (2020: 244), Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab Merkantilis berpendapat kekayaan emas dan perak merupakan sumber kekayaan dan kemakmuran suatu Negara. Keyakinan ini merupakan salah

satu faktor yang mendorong pedagang-pedagang di Negara Eropa menjelajahi dunia baru (Amerika, Australia dan New Zealand) dan menjajah Asia dan Afrika.

1. Pandangan Klasik

Penelitian yang lebih serius mengenai faktor-faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Adam Smith, yang menjadi pelopor dalam pemikiran ekonomi Klasik. Dalam bukunya: *“An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”*, yang diterbitkan lebih dari dua abad yang lalu, Smith mengemukakan beberapa pandangan mengenai beberapa faktor yang penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangannya yang utama adalah:

- a. Peranan sistem pasaran bebas. Smith berpendapat bahwa mekanisme pasar akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien dan pertumbuhan ekonomi yang teguh.
- b. Perluasan pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan memproduksi dengan tujuan untuk menjualnya kepada masyarakat dan mencari untung. Semakin luas pasaran barang dan jasa, semakin tinggi tingkat produksi dan tingkat kegiatan ekonomi.
- c. Spesialisasi dan kemajuan teknologi. Perluasan pasar dan perluasan kegiatan ekonomi yang digalakkannya, akan memungkinkan dilakukan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi.

2. Pandangan Schumpeter

Pada permulaan abad ini berkembang pula suatu pemikiran baru mengenai sumber dari pertumbuhan ekonomi dan sebabnya konjungtur berlaku. Dalam

bukunya *the theory of economic development* Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan dimana adakalanya berkembang dan pada ketika lain mengalami kemunduran. Konjungtur tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha melakukan inovasi atau pembaruan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa.

3. Teori *Harrod-Domar*

Teori Harrod-Domar mengingatkan kita bahwa sebagai akibat investasi yang dilakukan tersebut pada masa berikutnya kapasitas barang – barang modal dalam perekonomian akan bertambah. Teori Harrod-Domar menunjukan bahwa jawaban kepada persoalan ini relative permintaan agregat haruslah bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang – barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi masa lalu.

4. Teori *Neo-klasik*

Teori pertumbuhan neo-klasik pertama kali dikembangkan oleh Professor Robert Solow dalam tulisan yang berjudul *a kontribution of the theory of economic growth* yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari pertambahan dan perkembangan faktor – faktor yang mempengaruhi penawaran agregat.

Dalam Sukirno (2020: 244), menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas Roberth Maltus dan John Straurt Mill, maupun ekonom Neoklasik, Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan, bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Jumlah penduduk, 2. Jumlah stok barang modal, 3. Luas tanah dan kekayaan alam, dan 4. Tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi yang lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.

2.1.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hasyim (2017: 233), Pada dasarnya yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi ada tiga faktor, yaitu: (1) Faktor penawaran (*supply factors*); (2) Faktor permintaan (*demand factors*); dan (3) Faktor non-ekonomi (*noneconomic factors*). Suatu interaksi dari seluruh faktor tersebut perlu waktu panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Tiap faktor itu sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

1. Faktor Penawaran (*Supply Factors*)

Dari sisi faktor penawaran, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh lima kategori, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan ukuran dan kualitas tenaga kerja. Faktor SDM, sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambat proses pembangunan tergantung kepada SDM-nya selaku subjek pembangunan yang memiliki kompetensi memadai untuk melaksanakan proses pembangunan.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam (SDA) merupakan barang-barang ekonomi seperti minyak, kayu, dan lain-lain yang dapat dihasilkan dari lingkungan. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada SDA dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, SDA saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan SDM-nya dalam mengelola SDA yang tersedia. SDA yang dimaksud di antaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut.

c. Stok Modal

Stok modal atau sumber daya modal jumlah nilai dari lahan tempat usaha, bangunan, bahan, peralatan, mesin, dan lain-lain membantu manusia mengeksploitasi SDA. Stok modal, dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas iptek. Stok modal berupa barang-barang modal yang sangat penting bagi kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

d. Kewirausahaan

Kewirausahaan berhubungan dengan penemuan inovasi yang membantu memecahkan masalah inefisiensi, karena itu dapat memfasilitasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produksi.

e. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menunjukkan teknik-teknik yang produktif dari tenaga kerja yang digunakan untuk menciptakan

barang dan jasa. Perkembangan Iptek yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang pada awalnya menggunakan tangan manusia digantikan mesin-mesin canggih. Ini berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

2. Faktor Permintaan (*Demand Factors*)

Ekonomi pasar bebas tidak dapat berkembang tanpa permintaan barang tambahan yang dapat dihasilkan oleh perekonomian. Jika permintaan lebih kecil dari penawaran, investasi akan turun, sehingga memudarkan efek faktor-faktor pertumbuhan lainnya. Pengangguran akan muncul, mengurangi insentif kemajuan teknologi, dan akhirnya perekonomian akan mandek. Perubahan faktor penawaran harus diikuti oleh perubahan permintaan agar menghasilkan stimulus yang cukup untuk perekonomian. Permintaan sendiri bergantung pada ukuran atau kapasitas pasar, tingkat pendapatan konsumen, selera, dan kebutuhan. Contoh, Italia banyak memproduksi sepatu ke Amerika Serikat dibandingkan konsumsi domestik. Sebaliknya Amerika Serikat telah mengekspor banyak mesin dan produk pertanian ke pasar luar negeri. Meluasnya pasar, karena meningkatnya populasi domestik atau karena peningkatan perdagangan antar negara, menstimulasi investasi dan meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan pendapatan. Hal ini juga memungkinkan skala ekonomi terjadi, meningkatkan produktivitas dan standar hidup.

3. Faktor-faktor Non - Ekonomi

Para ekonom telah lama menyadari bahwa kebudayaan suatu bangsa mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan pertumbuhan ekonomi, Agama dan tradisi sosial dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Selama agama Hindu melarang pemotongan sapi karena hewan tersebut disakralkan, India tidak akan dapat mengembangkan industri pemrosesan daging sapi. Organisasi sosial kadang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Negara-negara feodal Eropa abad pertengahan menghambat kemajuan ekonomi, karena mengancam struktur kekuasaan. Setelah revolusi sosial dan politik pada abad-18 dan 19, golongan menengah yang kuat mendominasi kepentingan perdagangan komersial dan disusul oleh revolusi industri. Argumentasi ini bertolak belakang dengan contoh perkebunan karet rakyat di Indonesia dahulu, yang menunjukkan satu respons terhadap mekanisme harga dan memproduksi lebih banyak karet ketika pedagang menawarkan kepada mereka barang-barang industri sederhana seperti pakaian dan sepeda. Jadi, ukuran respons terhadap dorongan pertumbuhan ekonomi tertentu dapat diamati dalam berbagai kultur, dan ekonom kontemporer percaya bahwa teori pertumbuhan ekonomi dapat diterima pada kultur yang berbeda. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan di antaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat

menghambat proses pembangunan di antaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan seba- gainya.

Selanjutnya menurut Sukirno (2017: 425), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah akan mendorong jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal tersebut menyebabkan produktivitas bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat dari pada pertambahan tenaga kerja. Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan dimana pertambahan tenaga

kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduk, Pertumbuhan Ekonomi akan menurun. Dengan demikian penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat merosot.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat banyak jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah dari pada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Di dalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat

menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.

5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Pentingnya peranan luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila luas pasar terbatas tidak terdapat dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi moderen yang tingkat produktivitasnya sangat tinggi.

2.1.4. Hubungan antar Variabel X dengan Variabel Y

2.1.4.1. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Bastian (2019: 44), “Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”. Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah untuk memdanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebahagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara.

2.1.4.2. Hubungan Pendapatan Asli Desa dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Erlina dan Rasdianto (2019:111), menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: “Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.” Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah yang tentunya berhubungan dengan kinerja keuangan sebab kinerja keuangan bersumber dari pendapatan asli daerah dikalikan dengan seratus dibagi dengan total pendapatan sebuah daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama dengan penelitian ini dilakukan oleh Budianto dan Stanly W Alexander (2016) dengan judul Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Pada jurnal EMBA Vol.4 No.4 Desember 2016, Hal. 844-851 ISSN 2303-1174. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Dearah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Pendapatan Asli Dearah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah yang berarti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkatkan kinerja

keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengakibatkan kenaikan Dana Perimbangan menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ebit Julitawati, dkk (2017) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Volume 1, No. 1, Agustus 2017. Universitas Syiah Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pengaruh secara simultan dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil pengujian pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota secara simultan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,125. Dengan demikian variabel independen yang meliputi PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Joice Machmud dan Lukfiah Irwan Radjak (2018). Judul penelitian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia. Journal Of

Accounting Science Vol. 2 No. 1 EISSN 2548-3501. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Variabel PAD (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai 0,403 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Variabel DAU (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan dengan nilai 0,661 terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo. Dan secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen dalam hal ini PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo periode 2017-2016 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Metta Maheni dan Maryono (2021) dengan judul Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Proceeding SENDIU 2021. ISBN: 9788-979-3649-72-6. Program studi Akuntansi, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Stikubank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial nilai signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan tingkat signifikan sebesar $0,890 > 0,05$ yang artinya bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,091 yang berarti variabilitas variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi) yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen (PAD, DAU, BM) sebesar 9,1%

sedangkan sisanya 90,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Andri Gustaf Eka Saputera dan Pandoyo (2020). Dengan judul Pengaruh DAU, PAD Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekbank volume 3 Nomor 2 Desember 2020. Indonesia Banking School, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel Independent yaitu DAU dan PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan nilai koefisien determinasinya yaitu sebesar 0,2833. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi total pengaruh seluruh variabel Independent terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar 28,33%. Pengaruh variabel lain diluar model yang tidak diteliti adalah sebesar 71,67%. Seperti Retribusi Daerah, dan Penanaman Modal Asing. Secara parsial DAU berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,1544. Ini berarti setiap peningkatan satu satuan DAU akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 15,44%. Secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya sebesar 0,1337. Ini berarti setiap peningkatan satu satuan PAD akan meningkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 13,37%. hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,7240 ($0.7240 > 0,05$).

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Karmen Marpaung, dkk (2021). Dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Volume 7, Nomor 2 Desember

2021. ISSN: 2460-5204. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,275 tidak signifikan pada $(\alpha) = 0.05$. ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan dalam DAU sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,275% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan.

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,296 signifikan pada $(\alpha) = 0,05$ ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan PAD sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,296% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Pebby Anjelina, dkk (2019). Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. E-Journal Perdagangan Industri dan Moneter Vol. 7. No. 2, Mei – Agustus 2019. ISSN: 2303-1204. Prodi Ekonomi Pembangunan, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, nilai F-hitung sebesar 12,11152 dengan probabilitas sebesar $(0.000000 < 0,05)$ artinya H_0 ditolak H_a diterima pada tingkat keyakinan 66%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Uji t statistik untuk variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial diketahui t hitung sebesar

-2.292771. probabilitas Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah sebesar $0,0253 < \alpha = 5\%$ berarti variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode 2011-2017. Uji t statistik untuk variabel indeks Dana Alokasi Umum secara parsial diketahui t hitung sebesar -0,564638. Probabilitas Dana Alokasi Umum dalam penelitian ini adalah sebesar $0.5744 > \alpha = 5\%$ berarti variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,66 hal ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU mampu mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebesar 66%, sedangkan sisanya sebesar 34% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Argo Fahma A. P. dan Ida Nuraini (2017). Dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2016. Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol 1 Jilid 2/2017 Hal 163 – 175. Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel nilai Dana Alokasi Umum lebih kecil dari α (0,05) ($0,0004 < 0,05$), dapat dikatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf signifikan 5%. Nilai probabilitas variabel Pendapatan Asli Daerah ($0.0000 < 0,05$) dapat dikatakan bahwa variabel belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil uji F, dimana nilai probabilitas sebesar ($0.000000 < 0,05$) berarti H_0 ditolak dan menerima H_a .

Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah (serempak) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY Yogyakarta. Pengaruh dari ketiga variabel independent dapat dilihat dari nilai R square sebesar 0,89 jadi 89% Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 11% dipengaruhi oleh aktor lain.

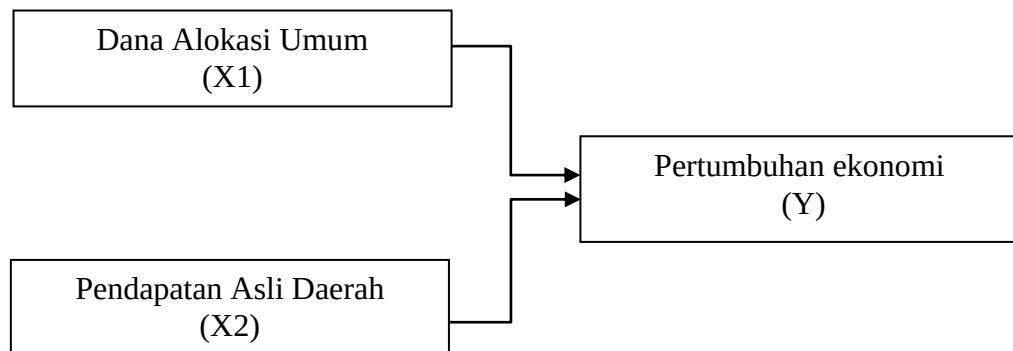
Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Dwi Astarani Aslindar dan Hening Pratika Nila Hapsari (2022). Dengan judul Determinan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Jurnal akuntansi, Vol 11, Nomor 1 (2022). p-ISSN (2088-219X), e-ISSN (2716-3830). Universitas Selamat Sri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel Pendapatan Asli Daerah nilai sig 0,427 yang berarti $> 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai sig 0,017 yang berarti $< 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9,655 > 2,66$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji F maka dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Berti Indah Sari dan Hamawati (2021). Dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 3. No. 1, Februari 2021, Hal 1-11. e-ISSN: 2656-3639. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. PAD memiliki nilai sinifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ artinya, PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. DAU memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, artinya DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil Uji Koefisien Determinasi, Adjusted R Square sebesar 0,274 hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebesar 27,4%, sedangkan 72,6% dipengaruhi oleh faktor lain.

2.3. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan kerangka pemikiran yang bertitik tolak dari latar belakang masalah. Masalah yang diambil tersebut kemudian disajikan dalam bentuk judul yang memiliki tiga variabel penelitian, satu variabel yang mempengaruhi yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan variabel yang dipengaruhi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Penelitian

Keterangan:

----- Secara Parsial
 _____ Secara Simultan

2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2020: 110), “hipotesis didefinisikan sebagai sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul”. Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2019 - 2023 baik secara parsial maupun simultan.